



Analisis Implementasi Pelaporan Anggaran Program Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik pada UPT Dalduk Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi

Irna Destiana Yusuf^{1*}, Idang Nurodin², Tina Kartini³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email: destianairna1412@gmail.com¹, idangnurodin4@gmail.com², tinakartini386@ummi.ac.id³

*Penulis Korespondensi: destianairna1412@gmail.com

Abstract. Budget reporting is an important aspect of ensuring transparency and accountability in public sector financial management. This study aims to analyze the implementation of budget reporting for the Family Planning Program at UPT DALDUK Caringin District, Sukabumi Regency, focusing on the implementation process, supporting and inhibiting factors, and its impact from a public sector accounting perspective. This study employed a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation involving the Head of UPT DALDUK, Treasurer, Administrative Staff, System Operator, and Family Planning Program Implementers. The results indicate that the implementation of budget reporting has been carried out through the stages of preparation, implementation, and evaluation in accordance with established procedures. Supporting factors include good coordination among staff, the availability of administrative documents, and reporting guidelines. Meanwhile, inhibiting factors include delays in document collection, limited human resources, and administrative technical constraints. The implementation of budget reporting has also contributed positively to improving transparency, accountability, effectiveness, and efficiency in managing the Family Planning Program budget. Therefore, efforts to enhance coordination and human resource capacity are necessary to optimize the quality of budget reporting in the future.

Keywords: Accountability; Budget Reporting; Family Planning Program; Public Sector Accounting; Transparency.

Abstrak. Implementasi pelaporan anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana pada UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, dengan fokus pada proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya dalam perspektif akuntansi sektor publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala UPT DALDUK, Bendahara, Staf Administrasi, Operator Sistem, dan Pelaksana Program Keluarga Berencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan anggaran telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai prosedur yang berlaku. Faktor pendukung meliputi koordinasi antarpegawai, ketersediaan dokumen administrasi, dan adanya pedoman pelaporan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterlambatan pengumpulan dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala teknis administrasi. Implementasi pelaporan anggaran juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran Program Keluarga Berencana. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kualitas pelaporan anggaran di masa mendatang.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Akuntansi Sektor Publik; Pelaporan Anggaran; Program Keluarga Berencana; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan mengatur dinamika demografi, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan program ini didanai melalui APBN/APBD sehingga pengelolaan dan pelaporan anggarannya harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen dalam mewujudkan akuntabilitas fiskal dan tata kelola keuangan yang baik (Susanti, 2023). Selain itu, pelaporan anggaran yang berkualitas merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan publik karena anggaran merupakan representasi perencanaan sekaligus pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik (Mustika et al., 2025).

Dalam praktiknya, implementasi pelaporan anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan dokumen pendukung, ketidaksinkronan antara laporan keuangan dan laporan kinerja, serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam memahami standar akuntansi sektor publik. Kondisi tersebut menyebabkan pelaporan anggaran belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, tetapi masih dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif (Judijanto et al., 2024). Di sisi lain, meningkatnya tuntutan transparansi publik menuntut setiap instansi pemerintah mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun pelaporan anggaran memiliki peran yang penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarpegawai, kelengkapan dokumen administrasi, serta ketepatan waktu penyampaian laporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan anggaran masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana Program Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta melaporkan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa fenomena empiris, yaitu pelaporan anggaran disusun sebagai bagian dari administrasi kegiatan, penyusunan laporan dilakukan oleh pegawai yang merangkap tugas administrasi, laporan disusun berdasarkan pencatatan kegiatan dan dokumen pendukung, serta laporan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan anggaran memerlukan koordinasi yang baik agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana pada UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dalam perspektif akuntansi sektor publik.

Fokus penelitian meliputi proses implementasi pelaporan anggaran, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi instansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan anggaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini diawali dengan pembahasan mengenai akuntansi dan akuntansi sektor publik sebagai landasan utama penelitian. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang menghasilkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan (Irfan Sophan et al., 2022). Dalam konteks pemerintahan, akuntansi sektor publik digunakan sebagai sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Mahsun et al. (2023), akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta karena bertujuan memberikan pelayanan publik serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran

Selanjutnya, penelitian ini mengkaji konsep akuntabilitas dan transparansi publik, konsep anggaran sektor publik, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai dasar dalam pelaksanaan pelaporan anggaran. Sawir (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban setiap pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan anggaran kepada pihak yang memberikan amanah. Sementara itu, transparansi menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penerapan SAP dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berfungsi sebagai pedoman agar pelaporan keuangan pemerintah disusun secara andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

Kajian teori juga membahas Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaan Program KB memerlukan pengelolaan anggaran yang efektif sehingga setiap penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, implementasi pelaporan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan sektor publik yang baik. Struktur kajian teori pada Bab II mencakup pembahasan mengenai akuntansi sektor publik, karakteristiknya, konsep anggaran, SAP, LRA, serta Program Keluarga Berencana sebagai fokus penelitian.

Selain landasan teori, penelitian ini juga mengulas sepuluh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi pelaporan anggaran, akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan keuangan sektor publik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pelaporan anggaran dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarpegawai, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, serta dukungan sistem informasi. Salah satu penelitian oleh Budi Utomo et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Berencana masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, disusun kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian mengenai implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana dalam perspektif akuntansi sektor publik pada UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam memperoleh dan menganalisis data. Penelitian ini dilaksanakan di UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dengan fokus pada implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana dalam perspektif akuntansi sektor publik.

Subjek penelitian terdiri atas lima informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala UPT DALDUK, Bendahara, Staf Administrasi, Operator Sistem, dan Pelaksana Kegiatan Program Keluarga Berencana. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam proses pelaporan anggaran sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam mengenai implementasi pelaporan anggaran (Sugiyono, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini memanfaatkan aplikasi **NVivo 12** sebagai alat bantu dalam melakukan *coding*, mengelompokkan data hasil wawancara, serta memvisualisasikan hubungan antar tema penelitian.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana.

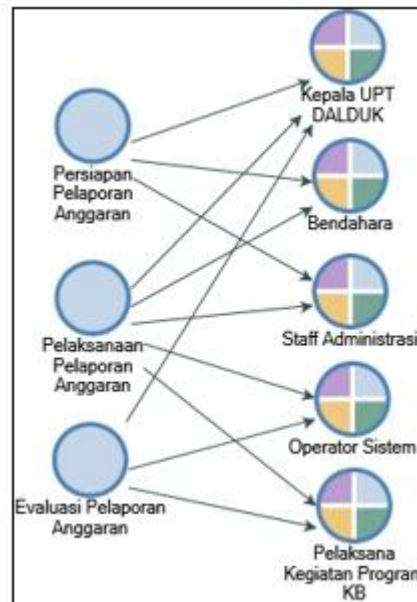
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi**, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. UPT DALDUK memiliki tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, serta pengelolaan Program Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Caringin. Selain melaksanakan berbagai kegiatan program, UPT DALDUK juga bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, pelaporan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Implementasi Pelaporan Anggaran Program Keluarga Berencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana di UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu **persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi**. Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan dokumen administrasi, serta kelengkapan bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan anggaran. Tahap pelaksanaan meliputi pencatatan realisasi anggaran, penyusunan laporan, serta penginputan data sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan dokumen pendukung sebelum disampaikan kepada instansi terkait.

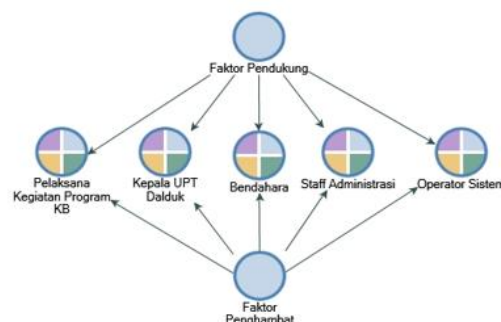


Gambar 1. Hasil pengolahan dari proses implementasi Pelaporan Anggaran Program Keluarga Berencana.

Hasil analisis menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan melibatkan Kepala UPT, Bendahara, Staf Administrasi, Operator Sistem, serta Pelaksana Kegiatan Program KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelaporan anggaran telah berjalan secara sistematis dan mendukung penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam perspektif akuntansi sektor publik.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pelaporan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan anggaran dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi koordinasi antarpegawai, kerja sama dalam penyusunan laporan, kelengkapan dokumen administrasi, serta pemanfaatan sistem pelaporan yang membantu proses penyusunan laporan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kelancaran proses pelaporan anggaran sehingga laporan dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

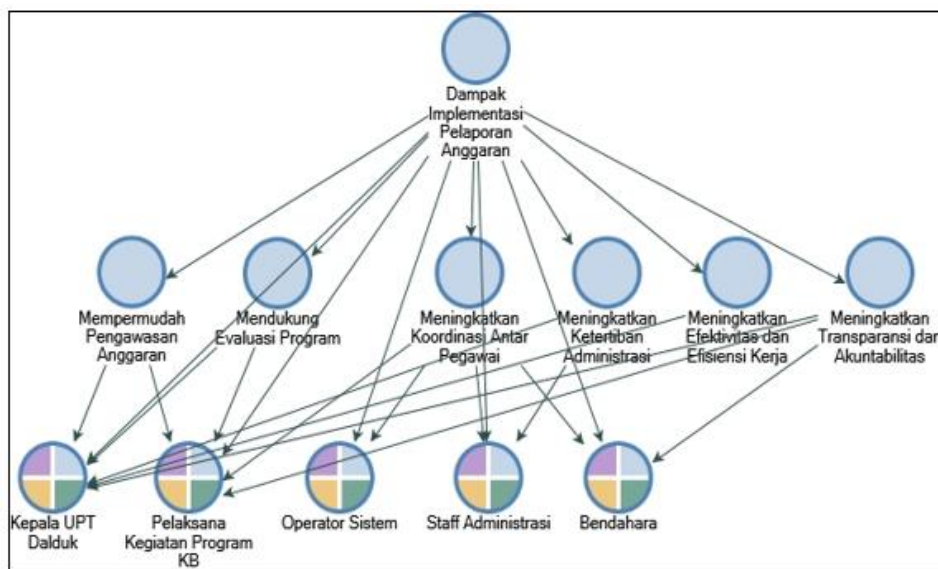


Gambar 2. Hasil Pengolahan Dari Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pelaporan Anggaran.

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung, koordinasi yang belum optimal, serta ketepatan waktu penyampaian data kegiatan. Meskipun demikian, hambatan tersebut masih dapat diatasi melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, dan evaluasi secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor pendukung lebih dominan dibandingkan faktor penghambat sehingga implementasi pelaporan anggaran tetap dapat berjalan dengan baik.

Dampak Implementasi Pelaporan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan anggaran memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan Program Keluarga Berencana. Dampak tersebut meliputi meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, kemudahan dalam pengawasan anggaran, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, serta ketertiban administrasi. Selain itu, pelaporan anggaran juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya.



Gambar 3. Hasil Pengolahan Dampak terhadap Pelaporan Anggaran Program Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil analisis NVivo 12, dampak implementasi pelaporan anggaran menunjukkan bahwa proses pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan sektor publik. Dengan demikian, implementasi pelaporan anggaran di UPT DALDUK Kecamatan Caringin telah sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Implementasi Pelaporan Anggaran Program Keluarga Berencana dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik pada UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pelaporan anggaran Program Keluarga Berencana telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling mendukung dalam proses penyusunan laporan anggaran. Pelaksanaan pelaporan anggaran telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan sehingga mampu menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terarah.

Implementasi pelaporan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berperan dalam menjaga kelancaran proses pelaporan, terutama melalui koordinasi antarpegawai, kelengkapan dokumen administrasi, pemanfaatan sistem pelaporan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, faktor penghambat masih ditemukan dalam bentuk keterlambatan pengumpulan data, kendala administrasi, serta hambatan teknis yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan. Meskipun demikian, hambatan tersebut masih dapat diatasi sehingga pelaporan anggaran tetap dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi.

Implementasi pelaporan anggaran memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan pada UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Pelaporan anggaran mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, serta mendukung proses pengawasan dan evaluasi program. Selain itu, pelaporan anggaran juga berkontribusi dalam menciptakan administrasi yang lebih tertib dan koordinasi kerja yang lebih baik sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, diantaranya sebagai berikut:

Bagi UPT DALDUK Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi

UPT DALDUK Kecamatan Caringin perlu menyusun jadwal pengumpulan dokumen dan data kegiatan secara lebih terstruktur untuk setiap pelaksana kegiatan Program Keluarga Berencana. Langkah ini dapat dilakukan dengan menetapkan batas waktu penyerahan dokumen pendukung sebelum proses penyusunan laporan anggaran dimulai sehingga keterlambatan pengumpulan data dapat diminimalkan.

Bagi Bendahara dan Staff Administrasi

Bendahara dan staff administrasi perlu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen secara berkala selama kegiatan berlangsung, tidak hanya pada saat penyusunan laporan. Pemeriksaan secara berkala dapat membantu mengurangi risiko dokumen yang tidak lengkap serta mempercepat proses verifikasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran.

Bagi Operator Sistem dan Pengelola Laporan

Perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis secara berkala terkait penggunaan sistem pelaporan anggaran dan perubahan ketentuan administrasi yang berlaku. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai sehingga kesalahan dalam proses input data dan penyusunan laporan dapat diminimalkan.

Bagi Kepala UPT DALDUK

Kepala UPT DALDUK perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan pelaporan anggaran, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kelengkapan dokumen. Monitoring yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi kendala yang muncul lebih awal sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut dan perbaikan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti efektivitas sistem informasi keuangan, kualitas sumber daya manusia, atau pengendalian internal dalam pelaporan anggaran sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Awir, A. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi Utomo, dkk. (2023). *Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Publik.
- Irfan Sophan, dkk. (2022). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Judijanto, dkk. (2024). *Tantangan Implementasi Pelaporan Keuangan di Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, & Purwaningsih. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mustika, dkk. (2025). *Kualitas Pelaporan Anggaran dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Jurnal Keuangan Publik.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti. (2023). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Akuntansi.